

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul:

**EFEKTIVITAS *AGREEMENT ON COMFORT WOMEN* DALAM MEMPERBAIKI
HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN**

***THE EFFECTIVENESS OF AGREEMENT ON WOMEN COMFORT IN IMPROVING JAPAN
AND SOUTH KOREA RELATIONS***



Disusun oleh:

Muhammad Taufan Wibawa Putra

20140510183

Yang Disetujui,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Grace Lestariana Wonoadi', written in a cursive style.

Grace Lestariana Wonoadi, S.IP., M.Si

Dosen Pembimbing

**EFEKTIVITAS *AGREEMENT ON COMFORT WOMEN* DALAM MEMPERBAIKI
HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN**

Muhammad Taufan Wibawa Putra

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

Agreement on Comfort Women are bilateral agreements between Japan and South Korea to resolve the most sensitive issue, namely comfort women. This issue rise when many people began to aware of the existence of Comfort Women and the importance of the struggle for their rights which Japan had taken during World War II. The awareness of the South Koreans, then continued with demonstrations demanding Japan's responsibility for the fate and rights of the comfort women.

The purpose of this study is to examine how effective the Agreement on Comfort Women to improving relations between Japan and South Korea. This study uses qualitative methods along with the theory of compliance, law efectiveness and international agreement. The theory of compliance and law efectiveness is used to explain how to measure the effectiveness of this agreement. While the concept of an international agreement is a reference to the implementation of this agreement, whether the steps taken by the two countries will be legal or not. The results of this study indicate that this agreement was not effective because of South Korea's disobedience due to the non-fulfillment of South Korea's interests in this agreement. in addition, this agreement failed to be oriented towards comfort women as the object of this agreement, and more to a political agreement.

Keyword: Comfort Women, Japan, South Korea, Compliance, National Interest, International Agreement

Pendahuluan

Jugun Ianfu berasal dari bahasa Jepang, yaitu *Ju* berarti ikut, *gun* berarti bala tentara atau militer, *ian* berarti kenyamanan atau hiburan dan *fu* adalah perempuan. Kebijakan *Jugun Ianfu* adalah kebijakan perbudakan seks secara massal, brutal dan sistematis, yang dibuat untuk memuaskan nafsu birahi tentara Jepang di daerah dimana mereka ditempatkan. Kebijakan ini muncul karena keresahan Jepang karena banyaknya tentara Jepang yang terjangkit penyakit kelamin akibat seringnya melakukan seks bebas dengan pelacuran maupun dengan warga pribumi selama mereka ditugaskan di daerah pendudukan. Selain itu, kebijakan ini dibuat untuk mengurangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh Jepang terhadap warga pribumi dimana mereka ditempatkan.¹

Jepang mendirikan tempat prostitusi pertama pada tahun 1932 di Shanghai.² Awalnya, kebijakan *Jugun Ianfu* ini menggunakan jasa wanita Jepang asli untuk kemudian ditawarkan kepada para tentara Jepang. Namun masalah timbul ketika Jepang memperluas daerah pendudukannya. Ketersediaan wanita Jepang tidak mencukupi untuk melayani tentara yang kian meningkat jumlahnya. Untuk mengatasi masalah ini kemudian tentara Jepang merekrut para wanita pribumi dimana mereka ditugaskan. Awalnya para wanita tersebut diiming-imingi untuk bekerja di pabrik dan perawat. Namun, ternyata mereka kemudian dimasukkan kedalam rumah penampungan dan kemudian dijadikan *Jugun Ianfu*. Situasi ini terus berlangsung dan kian meluas ke daerah pendudukan lainnya.³

Kebijakan *Jugun Ianfu* menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis, hal ini terjadi karena seringnya para *Jugun Ianfu* mendapat kekerasan seksual dari para tentara Jepang yang pada akhirnya menyebabkan trauma fisik. Para *Jugun Ianfu* mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti dipukuli, disiksa bahkan juga mengalami penusukan. Banyak para mantan *Jugun Ianfu* yang juga terkena penyakit kelamin akibat kegiatan seks yang terjadi selama mereka menjadi *Jugun Ianfu*. Keberadaan mereka sebagai *Jugun Ianfu* di dalam masyarakatpun masih sering mendapat

¹ Chunghee Sarah Soh, "The Korean "Comfort Women": Movement for Redress". *Asian Survey*, Vol. 36, No. 12 (Dec., 1996), pp. 1226-1240, 1228

² Pyong Gap Min, "Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class". *Gender and Society*, Vol. 17, No. 6 (Dec., 2003), pp. 938-957, 940

³ Tony Firman, "Jugun Ianfu, Budak Wanita di Masa Penjajahan Jepang", diakses dari <https://tirto.id/jugun-ianfu-budak-wanita-di-masa-penjajahan-jepang-cgZz>, pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 19.53.

respon negatif. Bahkan banyak perempuan eks *Jugun Ianfu* yang tidak bias tinggal dengan orang tuanya karena malu dengan keadaan mereka sebagai mantan *Jugun Ianfu*.⁴

Setelah Korea Selatan merdeka, hubungan Jepang dan Korea Selatan memasuki babak baru. Kali ini keduanya berstatus sama yaitu sebagai sebuah negara yang berdaulat, tidak lagi sebagai penjajah dan daerah terjajah. Pembukaan hubungan Jepang dan Korea Selatan di mulai pada desember tahun 1965 yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian mengenai hubungan dasar kedua negara. Dengan ditanda tangannya perjanjian ini menandakan dimulainya hubungan diplomatik Jepang dan Korea Selatan. Namun bukan berarti bahwa dengan adanya pembukaan hubungan diplomatik ini menghilangkan ingatan sejarah masa lalu diantara kedua negara.

Hubungan Korea Selatan dan Jepang seringkali mengalami tarik ulur karena sejarah kolonialisasi Jepang dan kebijakan kebijakannya saat masa pendudukan yang dianggap tidak manusiawi. Korea Selatan seringkali menuntut Jepang untuk memiliki pandangan yang tepat terkait sejarah di masa lalu dan mengakui sejumlah kebijakan yang telah diterapkan semasa pendudukan dan perang. Untuk masalah *Jugun Ianfu* sendiri, Korea Selatan juga merupakan salah satu negara yang cukup lantang menyuarakan keadilan bagi para korban kebijakan *Jugun Ianfu* yang masih hidup. Korea Selatan terus menuntut Jepang untuk mengakui kebijakan tersebut, meminta maaf kepada *Jugun Ianfu* dan memberikan ganti rugi baik moril maupun materil. Bagi Korea Selatan, masalah *Jugun Ianfu* bukan hanya sekedar masalah hak perempuan, namun juga merupakan masalah hak asasi manusia.

Isu *Jugun Ianfu* sendiri mulai diangkat menjadi sebuah isu nasional di Korea Selatan, karena adanya aspirasi dari masyarakat terkait tuntutan permintaan maaf kepada para *Jugun Ianfu* dan pertanggungjawaban atas perampasan hak hak wanita Korea di masa penjajahan Jepang. Tuntutan ini di suarkan melalui sebuah demonstrasi yang terjadwal oleh para aktivis dan masyarakat setiap hari Rabu yang dikenal sebagai *Wednesday Demonstration*.⁵

Pemerintah Korea Selatan sendiri merespon baik demonstrasi masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan sebuah lembaga bernama "*Korean Council for the women Drafted*

⁴ Pyong Gap Min, "Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class". *Gender and Society*, Vol. 17, No. 6 (Dec., 2003), pp. 938-957, 941

⁵ Rizka Fauzia, "*Diplomasi Korea Selatan Mendesak Jepang Menandatangani Agreemen on Comfort Women Tahun 2011-2015*". *JOM FISIP* Vol. 4 No. 1-15, 5

for military sexual slavery by Japan". Organisasi ini merupakan organisasi yang berfokus dalam penyelesaian *Jugun Ianfu*, salah satu pelanggaran yang menurut mereka paling tragis terhadap hak asasi perempuan yang terjadi di masa penjajah Jepang.⁶ Organisasi ini akan secara langsung mengkoordinasi demonstrasi dan mulai menggerakkan media untuk menyebarkan isu ini agar tersebar luar.

Jepang pada tahun 1993 sendiri sebenarnya sudah meminta maaf melalui juru bicaranya saat itu, Yohei Kono. Dalam kesempatan tersebut, Jepang mengakui keterlibatannya dalam kebijakan tersebut. Pada tahun 1995, Tomiichi Murayama mengeluarkan pernyataan serupa yang dikenal sebagai "Murayama Statement" yang menyatakan permintaan maaf atas sejarah di masa lalu. Selain itu, Jepang memberikan bantuan dana yang di salurkan melalui lembaga keuangan khusus yaitu *Asian Women Fund* ke para *Jugun Ianfu*. Namun Korea Selatan tidak langsung menerima dana tersebut karena menganggap bahwa permintaan maaf Jepang saat itu tidak tulus.⁷

Pernyataan Yohei Kono dan Tomiichi Murayama kemudian dibantah oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2007, Shinzo Abe justru menyangkal keterlibatan Jepang dengan mengatakan bahwa tidak ada satu bukti yang menyatakan Jepang mendukung adanya pembukaan kamp *Jugun Ianfu*. Shinzo Abe memang terkenal memiliki sikap konservatif terhadap isu sejarah kolonialisasi Jepang. Bahkan sifat konservatifnya tidak hanya membuat geram Korea Selatan, namun juga negara tetangga lainnya seperti Tiongkok dan Taiwan. Bahkan sikap konservatifnya dicela oleh politikus di dalam negeri.⁸

Shinzo Abe kembali memperuncing keadaan dengan mengunjungi Kuil Yasukuni yang memiliki nilai historis bagi Jepang. Kuil Yasukuni sendiri merupakan tempat bersemayamnya tentara Jepang yang gugur dalam perang dunia II. Kunjungan Abe ke Kuil Yasukuni ini mendapat kecaman dari Korea Selatan dan Tiongkok. Menteri Kebudayaan Korea Selatan, Yoo Jin-ryong mewakili pemerintah menyatakan bahwa kunjungan Perdana Menteri Abe ke Kuil Yasukuni

⁶ The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan, "Global Action Day Justice for Comfort Women"! Join the 1000th Wednesday Demonstration!?" Diakses dari https://www.koreaverband.de/wp-content/uploads/2011/07/ComfortWomen_1000Dem_PR-from-Korea_Dec2011.pdf pada 11 Januari 2018 pukul 21.54

⁷ Fauzia, Loc.Cit

⁸ Dhika Kusuma Winata, "Masa Depan Apologi Abe", diakses dari <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/10356/masa-depan-apologi-abe/2016-01-14> pada 11 Januari 2018 pukul 23.21

merupakan wujud pemahaman sejarah yang salah. Menurutnya kunjungan ini akan merusak stabilitas dasar dan kerjasama di Asia Timur Laut.⁹

Melihat kawasan Asia Timur yang mulai tidak stabil karena peningkatan kekuatan Tiongkok dan ancaman nuklir Korea Utara. Akhirnya, pemerintah Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan *Jugun Ianfu*. Penyelesaian ini diselesaikan melalui *Agreement on Comfort Women* yang ditandatangani oleh kedua negara pada 28 Desember 2015. *Agreement on Comfort Women* sendiri merupakan sebuah kesepakatan yang bersifat "Final and Irreversibly" antara Jepang dan Korea Selatan terkait Jugun Ianfu yang isinya memuat tiga hal penting. Yaitu, pertama, bahwa perjanjian ini memberikan "face-saving solution" bagi Korea Selatan untuk tetap membiarkan Jepang konsisten pada posisi masa lalunya, bahwa setiap permasalahan menyangkut penjajahan dimasa lalu sudah terselesaikan melalui perjanjian dasar hubungan antara Jepang dan Korea Selatan pada tahun 1965. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka Jepang tidak berkewajiban mengkompensasi secara individu, melainkan melalui badan yang nantinya akan dibentuk oleh Korea Selatan. Jepang memberikan kompensasi sebesar 8,3 Juta US Dolar yang bersumber dari anggaran nasional Jepang.

Kedua, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengungkapkan permintaan maaf dan rasa penyesalannya terkait isu ini. Pernyataan ini disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida. Ketiga, Jepang dan Korea Selatan sepakat bahwa isu ini telah diselesaikan dan tidak dapat dipulihkan lagi (Irreversibly). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi tuntutan dikemudian hari oleh presiden Korea Selatan, seperti yang telah terjadi dimasa pemerintahan Roh Moo-hyung.¹⁰

Korea Selatan, melalui pemerintahan Park Geun Hye, menerima bantuan Jepang untuk para *Jugun Ianfu*. Hal ini menimbulkan banyak sekali protes dari masyarakat terkait keputusan pemerintah tersebut. Salah satu aksi protes itu seperti yang dilakukan oleh salah satu biksu di Korea Selatan yang bernama Tak Sung Kang. Ia rela membakar dirinya hingga kritis sebagai wujud

⁹ Daniel Schearf, "China, Korea Selatan Kutuk Kunjungan PM Jepang ke Kuil Yasukuni", diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/china-korsel-kutuk-kunjungan-pm-jepang-ke-kuil/1818336.html>, pada 11 Januari 2018 pukul 23.41

¹⁰ Yuki Tatsumi, "Japan, South Korea Reach Agreement on 'Comfort Women' The agreement could provide a long-awaited breakthrough in Japan-Korea ties.", diakses dari <https://thediplomat.com/2015/12/japan-south-korea-reach-agreement-on-comfort-women/> pada 1 Februari 2018 pukul 11.11 WIB

protes terkait penerimaan bantuan tersebut. Selain itu, masih banyak lagi aksi dari masyarakat dan aktifis untuk menentang sikap pemerintah tersebut. Mereka menganggap bahwa pemerintah tidak meminta persetujuan para *Jugun Ianfu* yang masih hidup.¹¹ Ada 37 wanita *survivor Jugun Ianfu* yang masih hidup hingga kini dan masyarakat merasa bahwa pemerintah perlu mendengar suara mereka.¹²

Penulis menggunakan perjanjian internasional, kepatuhan dan efektivitas hukum untuk mengukur seberapa efektif *agreement on comfort women* dapat memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan yang selama ini terhambat *isu jugun ianfu*. pada dasarnya, perjanjian internasional merupakan bagian dari instrumen hukum internasional yang sah. Pembuatan sebuah perjanjian harus berdasarkan dari kaidah kaidah hukum internasional yang berlaku. *Agreement on comfort women* sendiri merupakan perjanjian yang masuk ke dalam golongan *treaty contract*, hal ini dikarenakan perjanjian ini hanya memuat permasalahan diantara Jepang dan Korea Selatan dan hanya berlaku untuk keduanya. Selain itu, bentuk pengesahan dalam perjanjian ini adalah melalui pertukaran *statement* antara Menteri Luar Negeri Jepang-Korea Selatan dan dikuatkan melalui Kepala Pemerintah masing masing negara. selain itu, yang tak kalah penting adalah kekuatan mengikat dari perjanjian ini adalah melalui sifat "*Final and Irreversibly*". Ini berarti bahwa setelah kedua negara memenuhi kewajiban masing masing dalam perjanjian ini, maka secara otomatis kedua negara telah sepakat bahwa perjanjian ini adalah puncak penyelesaian masalah diantara keduanya dan tidak dapat dipulihkan lagi dengan dengan perjanjian lainnya.

Bentuk efektivitas yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan efektivitas hukum dan kepatuhan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perjanjian internasional adalah bagian dari instrument hukum internasional, dan dalam pelaksanaanya seperti menurut Achmad Ali, sebuah hukum akan dinilai efektif atau tidak dari kepatuhan aparat hukum dalam hukum ini.¹³ Kepatuhan seperti yang telah dijelaskan oleh Abram Chayes dan Antonia Chayes, menyatakan bahwa kepatuhan sebuah negara kemudian dapat diukur melalui beberapa indikator. Yaitu, efisiensi, kepentingan dan norma. Untuk ketidakpatuhan dapat dilihat dari ambiguitas, kapabilitas

¹¹ Kompas, "Protes Kebijakan Pemerintah, Biksi Korea Selatan Bakar Diri", diakses dari <http://internasional.kompas.com/read/2017/01/08/11435021/protes.kebijakan.pemerintah.biksi.korea.selatan.bakar.diri> pada 10 Januari 2018 pukul 21.22

¹² BBC, "Jepang tarik duta besarnya terkait patung 'budak seks' di Korea Selatan", diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527303> , pada 10 Januari 2018 pukul 21.31

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), p.375.

dan dimensi temporal suatu perjanjian. Pada intinya adalah sebuah kepatuhan akan bergantung pada kepentingan suatu negara, kepentingan adalah sesuatu yang hendak di capai sehingga aktor akan cenderung mengikuti sesuatu yang sejalan dengan kepentingan mereka.¹⁴

Pembahasan

Sebagai sebuah perjanjian yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. *Agreement on Comfort Women* didasari atas berbagai kepentingan yang dibawa oleh kedua negara, baik Jepang dan Korea Selatan. Kepentingan Korea Selatan tentu didasarkan atas aspirasi banyak masyarakat terkait keadilan bagi para *jugun ianfu*. aspirasi masyarakat dan aktivis ini bergulir lamanya dari tahun 1992 hingga 2015. Selama hampir dua puluh tiga tahun masyarakat turun ke jalan dan berdemonstrasi menuntut keadilan akan para jugun ianfu. Ada beberapa hal yang menjadi poin terpenting dalam tuntutan masyarakat dan para aktivis. Pertama adalah permintaan maaf dan pemberian kompensasi yang setimpal kepada para jugun ianfu. Sebenarnya pemberian kompensasi sudah pernah terlaksana di tahun 1993, dimana pada saat itu, Jepang melalui *Asian Women Fund*, mendistribusikan kompensasi dan permintaan maaf yang saat itu masih berupa surat permintaan maaf untuk para jugun ianfu. Namun bentuk permintaan maaf seperti ini kemudian menuai banyak kecaman dari para jugun ianfu karena dianggap tidak mencerminkan ketulusan Jepang dalam meminta maaf dan penyesalannya.

Selain tuntutan permintaan maaf dan kompensasi, tuntutan lain yang dituntut masyarakat adalah mengenai pengakuan formal terhadap sejarah dan keberadaan *jugun ianfu*. Pengakuan ini menjadi penting bagi para jugun ianfu agar sejarah ini diketahui oleh masyarakat Jepang dan tidak lagi dilakukan dimasa depan. Bentuk pengakuan yang bisa dilakukan adalah dengan memasukan *jugun ianfu* sebagai bagian dari perundang undangan atau kurikulum sejarah. Sehingga *jugun ianfu* tidak dipandang sebagai mitos belaka dan diakui keberadaannya. Selain itu, hukuman setimpal bagi para pelaku juga menjadi tuntutan. Perlu diketahui bahwa permasalahan jugun ianfu pernah dibahas dalam pengadilan militer untuk timur jauh pada tahun 1955. Pada pengadilan tersebut, permasalahan kemanusiaan seperti jugun ianfu memang dibahas oleh pengadilan tersebut. Namun tidak ada pelaku yang dihukum dalam pengadilan tersebut. Bahkan pengadilan khusus perempuan

¹⁴ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, 1995, "The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements", Cambridge; Harvard University Press.

yang dibentuk tahun 1999 hingga 2001 pun tidak mampu memaksa Jepang untuk bertanggung jawab terkait permasalahan ini.

Namun, sepertinya kepentingan Korea Selatan dalam Agreement on Comfort Women ini tidak mendapat tempat yang layak. Dalam poin terkait kompensasi dan permintaan maaf dalam perjanjian ini misalnya, memperlihatkan seakan Jepang kembali tidak tulus dalam melakukan permintaan maaf dan memberikan kompensasi. Jepang memang memberi kompensasi dan permintaan maaf sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para *jugun ianfu*. Namun bentuk permintaan maaf ini sama saja seperti apa yang dilakukan Jepang pada tahun 1993. Selain itu, bentuk kompensasi juga dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para *Jugun Ianfu*. Jepang tidak menyalurkannya secara langsung. Namun, memberikan bentuk kompensasi tersebut kepada Korea Selatan dan membiarkan Korea Selatan yang menyalurkannya. Sekali lagi, Jepang berusaha berpegang teguh pada perjanjian pembentukan hubungan diantara keduanya ditahun 1965, dimana pada perjanjian tersebut telah jelas menyatakan bahwa permasalahan menyangkut sejarah dimasa lalu di selesaikan dalam perjanjian ini. Selain itu, juga tidak ada langkah kongkrit untuk mengakui *jugun ianfu* dalam bentuk pengakuan formal.

Selain itu, poin lain yang cukup merugikan bagi Korea Selatan adalah mengenai sifat “Final and Irreversibly”. Dimana di akhir perjanjian ini Korea Selatan dan Jepang sepakat bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang final dan tidak dapat dipulihkan lagi dengan catatan bahwa Jepang telah menuntaskan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian ini. Sifat “*final and irreversibly*” kemudin dimaknai sebagai usaha untuk menutup permasalahan ini. Namun, dengan isi perjanjian yang timpang dengan lebih menguntungkan Jepang, sifat ini kemudian menjadi permasalahan yang cukup serius terutama bagi Korea Selatan, karena secara tidak langsung jika Korea Selatan menyetujui perjanjian tersebut dengan sifat yang “*final and irreversibly*”, maka perjanjian tersebut akan sulit di amandemen jika perjanjian ini tidak memuaskan masyarakat.

Jepang dalam perjanjian ini lebih berorientasi pada kepentingan politik keamanan dan ekonomi. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini Asia Timur sedang tidak stabil karena agresifnya Korea Utara dengan misil dan rudal balistiknya. Jepang butuh aliansi untuk kemudian bertahan dalam kondisi ini. Sehingga perbaikan hubungan dengan Korea Selatan menjadi penting bagi Jepang. Selain karena keduanya merupakan sekutu, Korea selatan dianggap mampu menekan Korea Utara terkait uji rudal balistiknya. Bagi Jepang, kemampuan rudal balistik dan nuklir Korea

Utara menjadi ancaman serius bagi Jepang, mengingat Jepang pernah menjadi korban dari bom nuklir Amerika Serikat selama perang dunia II. Selain itu, Jepang membutuhkan kerjasama keamanan dengan Korea Selatan terkait pertukaran informasi rahasia untuk menunjang kebutuhan pertahanan dan keamanan. Kerjasama pertahanan dan keamanan diantara keduanya sempat tertunda akibat sentimen negatif masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang terkait sengketa teritorial dan permasalahan historis diantara keduanya, termasuk permasalahan *jugun ianfu*.

Selain kepentingan politik dan keamanan, Jepang juga mengejar kepentingan lainnya seperti kepentingan ekonomi terkait kerjasama dan lain sebagainya. Sampai saat ini kerjasama ekonomi antara keduanya terlihat lancar dan belum menemui kendala apapun. Namun, permasalahan *Jugun ianfu* ini bisa saja menjadi hambatan dikemudian hari dalam hubungan kerjasama ekonomi keduanya, sehingga Jepang harus mulai berfikir untuk menyelesaikan permasalahan historis ini agar tidak menjadi hambatan dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan kedepannya.

Berbeda dengan Korea Selatan, Jepang jauh lebih diuntungkan dalam perjanjian ini. Hal ini dapat dilihat dari poin perjanjian lainnya yaitu terkait dengan patung *jugun ianfu* yang berada diluar Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Jepang meminta Korea Selatan untuk merelokasi patung tersebut dari Kedutaannya. Jepang telah lama tidak setuju dengan pembangunan patung tersebut. Patung tersebut sangat melukai martabat Jepang dan dianggap sebagai penolakan Korea Selatan untuk berdamai. Jepang kemudian menggunakan perjanjian ini untuk menekan Korea Selatan untuk merelokasi patung *jugun ianfu* tersebut sebagai syarat kelancaran perjanjian. Patung *jugun ianfu* adalah simbol bagi perjuangan aktivis dan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak *jugun ianfu*. Selama Jepang tidak bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh dalam masalah, maka tidak ada alasan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk merelokasi patung tersebut dari tempatnya sekarang. Dan perlu digarisbawahi bahwa patung tersebut dibangun oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk merelokasinya tanpa persetujuan masyarakat.

Sifat “Final and Irreversibly” juga sangat menguntungkan Jepang. Hal ini dikarenakan jika kedua negara berhasil mencapai kesepakatan ini maka kecil peluang kasus ini akan terungkit di masa depan di antara Jepang dan Korea Selatan. Hal ini dikarenakan sifat ini yaitu jika kedua

negara sepakat maka perjanjian ini akan menjadi puncak penyelesaian permasalahan dan tidak ada perjanjian lain yang dapat menggantikan perjanjian ini.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi kepentingan Jepang dan Korea Selatan dalam perjanjian ini terlihat timpang. Isi perjanjian lebih menguntungkan Jepang dari pada Korea Selatan. Hal ini dapat terlihat dari konsistennya Jepang untuk tidak secara langsung menyampaikan permintaan maaf dan memberi kompensasi. Jepang masih berpegang teguh pada perjanjian pembentukan hubungan bilateral yang tidak mengharuskan Jepang untuk memberi kompensasi secara langsung. Selain itu tidak ada pengakuan yang kuat terkait *Jugun Ianfu* yang disampaikan oleh Jepang. Jepang memang meminta maaf, namun belum secara kuat mengakui keterlibatannya dalam pengorganisasian *Jugun Ianfu*. Selain itu, perjanjian ini juga cukup politis, karena lebih mementingkan perbaikan hubungan dibanding berorientasi pada *Jugun Ianfu* sebagai objek perjanjian tersebut. Melihat fakta yang ada dan ketimpangan dalam perjanjian ini. Maka dapat diprediksi bahwa Korea Selatan memiliki peluang untuk tidak patuh terhadap perjanjian ini. Hal ini didasarkan pada faktor faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam *On Compliance* yang di tulis oleh Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes. Faktor faktor tersebut adalah ambiguitas, kapabilitas dan dimensi temporal. *Agreement on Comfort Women* ini memiliki kapabilitas yang rendah bagi Korea Selatan dikarenakan tidak banyak memuat kepentingannya. Memang kepentingan utama dari Korea Selatan adalah permintaan maaf dan kompensasi, namun secara pelaksanaan tidak sesuai keinginan dari Korea Selatan dan para *Jugun Ianfu*. selain itu, perjanjian ini tidak memuat langkah yang lebih kongkret dalam memulihkan martabat dan harga diri *Jugun Ianfu*, padahal hal ini adalah hal yang penting pula bagi para *Jugun Ianfu* selain permintaan maaf dan kompensasi.

Fakta Hubungan Jepang dan Korea Selatan Pasca Agreement on Comfort Women

Agreement on Comfort Women memang sudah ditandatangani oleh Jepang dan Korea Selatan. namun sepertinya, perjanjian ini tidak menjamin penerapannya akan berjalan mulus dan kemudian dapat memperbaiki hubungan keduanya.

1. Penolakan Masyarakat Korea Selatan terhadap Agreement on Comfort Women

Jepang dan Korea Selatan mengalami gejolak di dalam negerinya, karena menandatangani *Agreement on Comfort Women*. Di Jepang, sikap Shinzo Abe untuk menandatangani *Agreement on Comfort Women* menuai banyak kecaman dari para kelompok

sayap kanan dan nasionalis.¹⁵ Menurut mereka, apa yang dilakukan oleh Shinzo Abe adalah perbuatan memalukan dan mencoreng martabat Jepang.¹⁶ Bahkan mereka menuntut Abe untuk melakukan harakiri karena telah mempermalukan Jepang di mata dunia melalui perjanjian ini. Kelompok sayap kanan dan nasionalis Jepang memang terkenal sangat sensitif dengan sejarah masa lalu. Mereka berpandangan bahwa Jepang tidak perlu melakukan permintaan maaf dalam isu-isu dimasa lalu,¹⁷ termasuk isu perbudakan seksual ini. Salah satu contoh yang pernah dilakukan oleh kelompok sayap kanan ini dalam menolak isu Jugun Ianfu ini adalah ketika seorang fotografer asal Korea Selatan melakukan pameran terkait Jugun Ianfu di gedung perusahaan kamera kenamaan di Jepang, Nikon. Saat itu banyak kelompok sayap kanan yang menolak pameran tersebut dan berunjuk rasa di depan gedung pameran.¹⁸

Korea Selatan tidak kalah mendapat banyak hujatan dari masyarakat dan aktivis pejuang hak *Jugun Ianfu*. Setelah *Agreement on Comfort Women* diterima oleh Korea Selatan, timbul gelombang kekecewaan dari masyarakat dan aktivis untuk pemerintah Korea Selatan yang saat itu dipimpin oleh Park Geun Hye.¹⁹ Kekecewaan tersebut bukannya tanpa dasar. Sikap pemerintah Korea Selatan yang menerima perjanjian yang dianggap tidak sama sekali merepresntasikan keinginan para Jugun Ianfu membuat masyarakat marah. Bahkan terungkap fakta bahwa para penyintas Jugun Ianfu tidak sama sekali dilibatkan dalam perumusan *Agreement on Comfort Women*.²⁰ Selain itu, isi *Agreement on Comfort Women* tidak sama sekali menyiratkan permintaan maaf yang tulus dari Jepang, dan perlu di garis bawahi bahwa tidak ada sama sekali statement yang secara jelas mengungkapkan bahwa Jepang mengakui keterlibatannya dalam pengorganisasian sistem perbudakan seksual di masa lalu. Padahal hal tersebut menjadi inti tuntutan para penyintas Jugun Ianfu.

¹⁵ Rupert Wingfield-Hayes, "Japan revisionists deny WW2 sex slave atrocities", diakses <http://www.bbc.com/news/world-asia-33754932>, pada 23 April 2018

¹⁶ Ibid

¹⁷ Dewi Agustin, "Mengintip Aktivitas Oyoku Dantai, Kelompok Sayap Kanan Nasionalis Jepang", diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/05/26/mengintip-aktivitas-uyoku-dantai-kelompok-sayap-kanan-nasionalis-jepang> pada 23 April 2018

¹⁸ Lee Yoo Eun, "Pameran Foto Jugun Ianfu Korea Disabotase di Jepang" diakses dari <https://id.globalvoices.org/2012/07/21/pameran-foto-jugun-ianfu-korea-disabotase-di-jepang/> pada 23 April 2018

¹⁹ Kompas, "Protes Kebijakan Pemerintah, Biksu Korea Selatan Bakar Diri", diakses dari <http://internasional.kompas.com/read/2017/01/08/11435021/protes.kebijakan.pemerintah.biksu.korea.selatan.bakar.d.iri.pada.23> April 2018

²⁰ Ibid

Permintaan Jepang untuk merelokasi patung Jugun Ianfu yang terdapat didepan Kedutaan Besar Jepang di Seoul juga menuai kecaman. Para aktivis dan masyarakat menilai dengan permintaan tersebut, Jepang berusaha untuk mengelak terkait perbudakan seksual yang dilakukannya di masa pendudukan.²¹ Patung Jugun Ianfu merupakan simbol kesengsaraan para Jugun Ianfu, dan sudah sepantasnya itu dapat dipahami oleh Jepang.²²

Sejak pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa telah terjadi kesepakatan dengan Jepang terkait permasalahan Jugun Ianfu, banyak masyarakat yang menyuarakan aspirasinya untuk membatalkan perjanjian tersebut. bahkan, beberapa masyarakat menggunakan cara ekstrim untuk mengungkapkan aspirasinya. Salah satunya, adalah Tak Sungkang, seorang biksu berumur 64 Tahun yang rela membakar dirinya sendiri sebagai wujud protes terhadap keputusan pemerintah menerima permintaan maaf Jepang.²³ ia bahkan menyebut Park Geun Hye sebagai seorang penghianat karena menyetujui perjanjian tersebut.²⁴

2. Inkonsistensi Jepang dalam mengakui *Jugun Ianfu* dan Desakan Relokasi Patung *Jugun Ianfu*

Jepang sepertinya juga tidak begitu sungguh sungguh dalam meminta maaf atas sistem perbudakan seks di masa lalu. Hal ini dapat dilihat Pada 1 februari 2016, dua bulan pasca penandatanganan *Agreement on Comfort Women*, Jepang mengejutkan banyak pihak dengan membantah bahwa Jepang melakukan tindakan koersif dalam isu *Jugun Ianfu*.²⁵ Pernyataan ini disampaikan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Menurut Jepang tidak ada bukti yang dapat mengkonfirmasi bahwa Jepang telah melakukan tindakan pemaksaan dalam isu *jugun ianfu*. pernyataan ini terang saja menjadi membingungkan banyak pihak mengingat bahwa 2 bulan sebelumnya, Jepang baru saja menandatangani *Agreement on Comfort Women*. Dengan penandatanganan perjanjian tersebut, secara tidak langsung Jepang mengakui segala bentuk tindakan terkait sistem perbudakan seks, termasuk terkait perekrutan secara paksa para *jugun ianfu*. Selain itu, pernyataan ini juga menjadi rancu karena sebelumnya pada tahun 1999-2001, ketika pengadilan kejahatan perang atas wanita mengadili

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Inilah.com, Jepang Tetap Tak Mengakui Eksistensi Jugun Ianfu, diambil dari <https://dunia.inilah.com/read/detail/2271013/jepang-tetap-tak-mengakui-eksistensi-jugun-ianfu> pada 23 April 2018.

perkara *jugun ianfu* ini. Sudah ada beberapa bukti yang jelas baik itu berupa memo maupun dokumen dokumen lain yang menyatakan bahwa pemerintah Jepang secara sah terlibat dalam pengorganisasian sistem perbudakan seksual dan perekrutan secara koersif para *jugun ianfu*.²⁶

Perlahan lahan permasalahan *Jugun Ianfu* mulai kembali meluap ke permukaan. Meskipun permasalahan ini sebenarnya sudah diselesaikan melalui *Agreement on Comfort Women*. Namun sepertinya ada ganjalan dalam penerapan perjanjian ini. Jepang terus mendesak Korea Selatan untuk memindahkan patung *Jugun Ianfu* yang ada di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Jepang bersikukuh bahwa Korea Selatan harus mentaati perjanjian yang sudah di tandatangani oleh kedua negara. Namun, permintaan Jepang tersebut tak kunjung dilaksanakan oleh Korea Selatan.²⁷ Pemerintah Korea Selatan beralasan bahwa pembangunan patung *jugun ianfu* didepan Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan itu diluar kuasa pemerintah Korea Selatan.²⁸ selain itu, muncul patung *jugun ianfu* lain di depan konsulat Jendral Jepang di Busan. Pembangunan patung tersebut sebagai bentuk protes atas *Agreement on Comfort Women* yang dinilai oleh banyak aktivis sebagai kesepakatan yang cacat. Hal ini kemudian berbuntut pada penarikan Duta Besar Jepang, Yasumasa Nagami dan Konsulat Jendral di Busan sebagai bentuk protes. Selain itu, Jepang juga menunda pembicaraan terkait kerjasama ekonomi antara kedua negara, termasuk kesepakatan *currency swap* dengan Korea Selatan.²⁹ penundaan ini menurut Taro Aso selaku menteri keuangan Jepang didasarkan adanya ke tidak saling percaya dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan, sehingga jika dilanjutkan maka kesepakatan ini menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Korea Selatan menyayangkan sikap Jepang menunda pembicaraan ekonomi tingkat tinggi dan kesepakatan *currency swap* dikarenakan alasan alasan politik.³⁰

²⁶ Komisi Hak Asasi Manusia, Loc.Cit

²⁷ Muh Shamil, Patung Jugun Ianfu Picu Ketegangan, diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1168960/40/patung-jugun-ianfu-picu-ketegangan-1483800407>, pada 23 April 2018

²⁸ Wikanto Arungbudoyo, Protes Patung Jugun Ianfu, Diplomat Jepang Tinggalkan Korsel, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/01/09/18/1586486/protes-patung-jugun-ianfu-diplomat-jepang-tinggalkan-korsel>, pada 23 April 2018

²⁹ Ibid

³⁰ Novi Christastuti, Jepang Tarik Dubes dari Korsel Terkait Patung Wanita Penghibur, diakses dari <https://news.detik.com/internasional/3389546/jepang-tarik-dubes-dari-korsel-terkait-patung-wanita-penghibur>, pada 23 April 2018

Penarikan Duta Besar Jepang ini tidak berlangsung lama. April 2017, Jepang mengirim kembali Duta Besarnya ke Korea Selatan. hal ini sebagai dampak dari ditahannya Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye karena kasus korupsi yang melibatkannya dan teman dekatnya.³¹ Jepang perlu mengirim kembali Duta Besarnya untuk menganalisis situasi dan mempertahankan hubungan dengan Korea Selatan ditengah ancaman nuklir Korea Utara.

3. Wacana Peninjauan Kembali *Agreement on Comfort Women* oleh Korea Selatan

Mei 2017, merupakan bulan penuh sejarah bagi Korea Selatan, Korea Selatan memiliki Presiden baru beraliran liberal bernama Moon Jae In. Kemenangan Moon Jae In dalam Pemilihan Presiden Korea Selatan membawa angin segar bagi banyak pihak, terutama para *jugun ianfu*. Benar saja, Moon Jae In sudah mendeklarasikan penolakannya Korea Selatan terhadap *Agreement on Comfort Women*. Penolakan ini didasarkan pada banyaknya aspirasi masyarakat yang menolak perjanjian ini. Deklarasi ini sekaligus menegaskan garis kebijakannya dalam isu perbudakan seksual dengan Jepang. Moon Jae In mendorong adanya konsultasi bilateral untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini kemudian mendapat dukungan dari Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres.³²

Korea Selatan juga berencana untuk mendaftarkan dokumen terkait perbudakan seksual ke “*Memory of the World*” milik Badan PBB, UNESCO. Dokumen yang ingin didaftarkan Korea Selatan berisi kesaksian para *Jugun Ianfu* dimasa pendudukan Jepang. Isu budak seksual bukan lagi hanya sekedar isu antar negara, tetapi juga sebuah isu global. Melihat usaha Korea Selatan tersebut, Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, menyatakan kekecewaannya. Ia menyalahkan sikap Korea Selatan tersebut. menurutnya, pendaftaran dokumen tersebut bertentangan dengan misi dan tujuan awal UNESCO dibentuk, yaitu untuk mendorong persahabatan dan pemahaman bersama antar negara negara anggota.³³

³¹ Rinaldy Sofwan, Jepang Kembalikan Dubes ke Korsel setelah Kisruh Jugun Ianfu, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170403164631-113-204624/jepang-kembalikan-dubes-ke-korsel-setelah-kisruh-jugun-ianfu>, pada 23 April 2018.

³² Rahman Asmardika, Warga Korsel Tolak Kesepakatan Jepang Soal Jugun Ianfu, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/05/30/18/1702955/warga-korsel-tolak-kesepakatan-jepang-soal-jugun-ianfu>, pada 23 April 2018.

³³ Wikanto Arungbudoyo, Jepang Protes Upaya Pendaftaran Dokumen Budak Seks ke PBB, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/07/12/18/1734148/jepang-protes-upaya-pendaftaran-dokumen-budak-seks-ke-pbb>, pada 23 April 2018

Korea Selatan juga mewacanakan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap *Agreement on Comfort Women*. Peninjauan ini dikarenakan perjanjian ini dianggap perjanjian yang cacat dan tidak berorientasi korban sesuai standar penyelesaian masalah masalah hak asasi manusia.³⁴ Namun wacana tersebut gagal terealisasi karena terdapat bukti secara sah bahwa kedua negara telah setuju bahwa permasalahan terkait perbudakan seks telah diselesaikan dan tidak dapat dipulihkan kembali pada tahun 2015 lalu.³⁵ Namun, Moon Jae In tetap meminta kepada Jepang untuk melakukan tindakan lain yang dapat memulihkan harkat dan martabat *Jugun Ianfu* Korea Selatan. Namun usulan tersebut ditolak oleh Jepang. Jepang menolak untuk melakukan perluasan untuk perjanjian tersebut.

Permasalahan renegotiasi dalam perjanjian internasional sebenarnya diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian bilateral. Permasalahan renegotiasi atau bahkan pembatalan dan penghentian dapat dilihat dalam bagian 4 terkait amandemen dan modifikasi perjanjian internasional, Dinyatakan bahwa sebuah perjanjian memiliki kemungkinan untuk di ubah atas kesepakatan diantara negara peserta perjanjian. Namun renegotiasi sendiri tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Jika *Agreement on Comfort Women* ini memiliki ukuran yang jelas mengenai ketentuan perubahannya, maka baik Jepang dan Korea Selatan wajib mengikuti ketentuan tersebut. hal ini adalah konsekuensi karena masing masing telah mengikatkan diri dengan isi perjanjian tersebut beserta ketentuan ketentuan yang telah diatur didalamnya. Namun, jika perjanjian tersebut tidak memuat ketentuan apapun mengenai perubahan dan lain sebagainya, maka perubahan perjanjian akan mengikuti aturan dan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969.

Mengenai tingkat kepatuhan antara kedua negara, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes dalam *On Compliance*, bahwa kepentingan nasional menjadi hal terpenting dalam menentukan kepatuhan. Hubungan internasional pasca *Wesphalia Agreement* mengalami perkembangan. Hubungan negara tidak lagi dalam batasan kegerejaan namun juga mengenai kepentingan nasional masing masing negara. maka sudah pasti setiap negara pasti akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Termasuk dalam sebuah perjanjian. Patuh

³⁴ Arie Mega Prastiwi, Jepang dan Korsel Bersitegang Soal Budak Seks Perang Dunia II, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3208774/jepang-dan-korsel-bersitegang-soal-budak-seks-perang-dunia-ii>, pada 23 April 2018

³⁵ Harian Nasional, Korsel tak Ingin Renegosiasi soal Jugun Ianfu, diakses dari www.harnas.co/2018/01/09/korsel-tak-minta-renegosiasi-soal-ianfu, pada 23 April 2018.

atau tidaknya suatu negara akan bergantung dengan apakah perjanjian internasional tersebut dapat mengakomodir kepentingannya. Dalam kasus Jepang dan Korea Selatan terkait *Agreement on Comfort Women*, dapat dilihat bahwa sejak awal perjanjian ini tidak maksimal dalam mengakomodir kepentingan Korea Selatan. tercatat dalam perjanjian tersebut hanya mengakomodir terkait permintaan maaf dan kompensasi bagi para *jugun ianfu*. Bahkan terkait permintaan maaf dan kompensasi tidak sesuai dengan apa yang di inginkan *jugun ianfu*. selain itu perjanjian ini juga lebih memuat kepentingan politis dibanding kepentingan untuk korban sehingga penerapannya pun menjadi tidak maksimal dan menuai banyak tentangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini tidak begitu maksimal dalam memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis berusaha memaparkan bagaimana efektivitas sebuah *Agreement on Comfort Women* dalam memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan yang telah lama mengalami pasang surut akibat perseteruan historis. Penelitian ini menggunakan konsep Perjanjian Internasional, Kepatuhan (Compliance) dan Kepentingan Nasional untuk meneliti seberapa efektif perjanjian ini kemudian dapat memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan yang di nilai dari tingkat kepatuhan Jepang dan Korea Selatan terhadap perjanjian ini. Seperti yang sudah dipaparkan dalam tulisannya bertajuk *On Compliance*, Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes memaparkan bahwa tingkatan kepatuhan tidak mempunyai ukuran yang jelas. Tindakan patuh atau tidak kemudian akan bergantung pada bagaimana Kepentingan Nasional dapat terakomodir dengan baik dalam perjanjian yang diikuti. Jika kepentingan nasional dapat terakomodir dengan baik, maka kemudian negara akan patuh pada perjanjian tersebut dan kemudian penerapannya akan menjadi lebih efektif, dan begitupun sebaliknya.

Agreement on Comfort Women ini sendiri adalah sebuah langkah maju bagi Jepang dan Korea Selatan dalam menyelesaikan perseteruan historis diantar keduanya. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang “Final and Irreversibly”, yang berarti bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian final dan tidak dapat dipulihkan lagi. Hal ini menjadi usaha bagi keduanya agar permasalahan ini tidak mencuat kepermukaan di kemudian hari. Perjanjian ini memuat beberapa hal penting yang menjadi tuntutan bagi para korban, pertama adalah permintaan maaf, perjanjian

ini memuat permintaan maaf dari Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe terkait apa yang dilakukan Jepang di masa lalu. Permintaan maaf ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Jepang mengakui keterlibatannya dalam pengorganisasian jugun ianfu. kedua adalah mengenai pemberian kompensasi terhadap para korban kebijakan perbudakan seksual. Jepang memberikan kompensasi sebesar 1 Miliar Yen, atau setara 8,3 Juta US Dolar kepada para jugun ianfu Korea Selatan. namun pemberian kompensasi ini tidak langsung melalui pemerintahan Jepang, namun melalui lembaga yang di bentuk oleh pemerintah Korea Selatan yang secara khusus nantinya mendistribusikan kompensasi dan permintaan maaf kepada para jugun ianfu.

Selain itu, Jepang meminta kepada Korea Selatan untuk memindahkan patung jugun ianfu yang berada di Kedutaan Besar Jepang sebagai syarat kelancaran perjanjian ini. Patung jugun ianfu telah lama menjadi perhatian pemerintah Jepang. Patung ini dibangun tahun 2011 oleh aktivis sebagai wujud desakan untuk pemerintah Jepang untuk sesegera mungkin meminta maaf dan memberikan kompensasi yang setimpal dan tuntutan tuntutan lainnya. Pendirian patung jugun ianfu ini melukai martabat Jepang, selain itu pembiaran terhadap patung ini dianggap sebagai penolakan Korea Selatan untuk berdamai.

Terwujudnya perjanjian ini di antara Jepang dan Korea Selatan menimbulkan kontra, khususnya di Korea Selatan. kalangan masyarakat dan aktivis menilai bahwa perjanjian ini hanyalah perjanjian yang bersifat politis bukan untuk kepentingan para jugun ianfu. mereka menganggap pemerintah telah gagal dalam memenuhi tuntutan para jugun ianfu terutama terkait pengakuan terkait sistem perbudakan seks yang melibatkan jugun Ianfu. pemerintah Jepang memang telah mengakui keterlibatannya dalam sistem tersebut. Namun tidak ada langkah kongkrit untuk mengakui keterlibatan tersebut seperti memasukan jugun ianfu sebagai bagian dari perundang undangan atau bahkan memasukan sejarah jugun ianfu sebagai bagian dari kurikulum sejarah. Selain itu, para jugun ianfu sendiri tidak sama sekali dilibatkan dalam tercapainya perjanjian tersebut. hal ini semakin meyakinkan bahwa perjanjian ini hanya untuk tujuan tujuan politis kedua negara.

Sikap Jepang pasca perjanjian ini juga membingungkan banyak kalangan. Hal ini dikarenakan pasca dua bulan perjanjian ini di teken kedua negara. Jepang justru mengirimkan dokumen terkait penolakannya terhadap sikap koersif pada perekrutan Jugun Ianfu. hal ini tentu sangat membingungkan karena Jepang baru saja meneken kesepakatan untuk mengakhiri

perdebatan terkait Jugun Ianfu. selain itu, sikap Jepang ini bertentangan dengan fakta yang ada dalam pengadilan kejahatan perang terhadap perempuan pada tahun 1999-2001. Fakta tersebut berkaitan dengan keterlibatan para petinggi pemerintah dalam sistem perbudakan seks ini dan terkait perekrutan paksa para jugun ianfu.

Permasalahan patung jugun ianfu semakin merenggangkan hubungan Jepang dan Korea Selatan. Jepang menuntut Korea Selatan untuk sesegera mungkin memindahkan patung jugun ianfu dari Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Permintaan ini kemudian tidak bisa dituruti oleh pemerintah Korea Selatan karena permasalahan patung tersebut diluar kuasa pemerintah. Kemarahan Jepang semakin menjadi jadi ketika Konsulat Jendral Jepang di Busan mejadi sasaran pemasangan patung jugun ianfu oleh para aktivis yang menolak Agreement on Comfort Women. Buntut dari itu, Jepang kemudian menarik duta besarnya pada 6 Januari 2017 sebagai bentuk protes. Selain itu, Jepang juga menunda pembicaraan ekonomi tingkat tinggi dan kerjasama currency swap antara kedua negara. Korea Selatan menyayangkan sikap Jepang yang menunda kerjasama hanya karena permasalahan politik. Namun selang 3 bulan, Jepang mengembalikan Duta Besarnya ke Korea Selatan guna memantau situasi politik di Korea Selatan pasca pemakzulan Park Geun Hye. Penarikan Duta Besar menjadi bukti bahwa Agreement on Comfort Women menjadi tidak terlalu cukup efektif dalam memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan. Agreement on Comfort Women gagal untuk meredam kembali konflik konflik histori di antara keduanya.

Permasalahan Jugun Ianfu terus bergulir bahkan pasca Korea Selatan memiliki Presiden baru. Moon Jae In selaku Presiden Korea Selatan yang baru langsung menolak adanya Agreement on Comfort Women, penolakan itu disampaikan setelah ia menerima banyak penolakan terkait perjanjian ini dalam masyarakat. Penolakan oleh Moon Jae In ini diikuti oleh wacana pemerintah untuk meninjau ulang, peninjauan ulang ini direspon Jepang, pemerintah Jepang menyayangkan sikap Korea Selatan dan menyatakan peninjauan ulang akan membuat hubungan keduanya semakin kacau. Wacana peninjauan ulang ini tak bertahan lama karena pemerintah Korea Selatan tidak bisa mengelak bahwa pemerintah sebelumnya telah setuju bahwa permasalahan Jugun Ianfu telah selesai. Namun, pemerintah Korea Selatan tetap meminta Jepang untuk memberi tindakan tindakan lebih untuk mengembalikan martabat jugun ianfu.

Wacana peninjauan kembali Agreement on Comfort Women semakin membuktikan bahwa perjanjian ini kurang efektif dalam memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan. perjanjian ini gagal berorientasi korban sesuai dengan standar penyelesaian konflik hak asasi manusia. Jugun ianfu memang menerima kompensasi dan permintaan maaf dari pemerintah Jepang. Namun bentuk permintaan maaf dirasa tidak terlalu tulus. Bentuk kompensasi dan permintaan maaf ini juga tidak ada bedanya dengan yang diberikan oleh AWF pada tahun 1995. Selain itu, tidak ada langkah yang lebih legal untuk mengakui sistem perbudakan ini. Padahal salah satu tuntutan jugun ianfu adalah jugun ianfu harus masuk kedalam sistem perundang undangan Jepang dan kurikulum sejarah agar masyarakat paham dengan sejarah Jugun Ianfu.

Referensi

- Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, 1995, "The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements", Cambridge; Harvard University Press.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Arie Mega Prastiwi, Jepang dan Korsel Bersitegang Soal Budak Seks Perang Dunia II, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3208774/jepang-dan-korsel-bersitegang-soal-budak-seks-perang-dunia-ii>, pada 23 April 2018
- BBC, "Jepang tarik duta besarnya terkait patung 'budak seks' di Korea Selatan", diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527303> , pada 10 Januari 2018 pukul 21.31
- Chunghhee Sarah Soh, "The Korean "Comfort Women": Movement for Redress". Asian Survey, Vol. 36, No. 12 (Dec., 1996), pp. 1226-1240, 1228
- Daniel Schearf, "China, Korea Selatan Kutuk Kunjungan PM Jepang ke Kuil Yasukuni", diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/china-korsel-kutuk-kunjungan-pm-jepang-ke-kuil/1818336.html>, pada 11 Januari 2018 pukul 23.41
- Dewi Agustin, "Mengintip Aktivitas Oyoku Dantai, Kelompok Sayap Kanan Nasionalis Jepang", diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/05/26/mengintip-aktivitas-uyoku-dantai-kelompok-sayap-kanan-nasionalis-jepang> pada 23 April 2018
- Dhika Kusuma Winata, "Masa Depan Apologi Abe", diakses dari <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/10356/masa-depan-apologi-abe/2016-01-14> pada 11 Januari 2018 pukul 23.21

Harian Nasional, Korsel tak Ingin Renegosiasi soal Jugun Ianfu, diakses dari www.harnas.co/2018/01/09/korsel-tak-minta-renegosiasi-soal-ianfu, pada 23 April 2018.

Inilah.com, Jepang Tetap Tak Mengakui Eksistensi Jugun Ianfu, diambil dari <https://dunia.inilah.com/read/detail/2271013/jepang-tetap-tak-mengakui-eksistensi-jugun-ianfu> pada 23 April 2018.

Kompas, “Protes Kebijakan Pemerintah, Biksu Korea Selatan Bakar Diri”, diakses dari <http://internasional.kompas.com/read/2017/01/08/11435021/protes.kebijakan.pemerintah.biksu.korea.selatan.bakar.diri> pada 10 Januari 2018 pukul 21.22

Kompas, “Protes Kebijakan Pemerintah, Biksu Korea Selatan Bakar Diri”, diakses dari <http://internasional.kompas.com/read/2017/01/08/11435021/protes.kebijakan.pemerintah.biksu.korea.selatan.bakar.diri> pada 23 April 2018

Lee Yoo Eun, “Pameran Foto Jugun Ianfu Korea Disabotase di Jepang” diakses dari <https://id.globalvoices.org/2012/07/21/pameran-foto-jugun-ianfu-korea-disabotase-di-jepang/> pada 23 April 2018

Muh Shamil, Patung Jugun Ianfu Picu Ketegangan, diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1168960/40/patung-jugun-ianfu-picu-ketegangan-1483800407>, pada 23 April 2018

Novi Christiastuti, Jepang Tarik Dubes dari Korsel Terkait Patung Wanita Penghibur, diakses dari <https://news.detik.com/internasional/3389546/jepang-tarik-dubes-dari-korsel-terkait-patung-wanita-penghibur>, pada 23 April 2018

Pyong Gap Min, “Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class”. *Gender and Society*, Vol. 17, No. 6 (Dec., 2003), pp. 938-957, 940

Pyong Gap Min, “Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class”. *Gender and Society*, Vol. 17, No. 6 (Dec., 2003), pp. 938-957, 941

Rahman Asmardika, Warga Korsel Tolak Kesepakatan Jepang Soal Jugun Ianfu, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/05/30/18/1702955/warga-korsel-tolak-kesepakatan-jepang-soal-jugun-ianfu>, pada 23 April 2018.

Rinaldy Sofwan, Jepang Kembalikan Dubes ke Korsel setelah Kisruh Jugun Ianfu, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170403164631-113-204624/jepang-kembalikan-dubes-ke-korsel-setelah-kisruh-jugun-ianfu>, pada 23 April 2018.

Rizka Fauzia, “*Diplomasi Korea Selatan Mendesak Jepang Menandatangani Agreemen on Comfort Women Tahun 2011-2015*”. JOM FISIP Vol. 4 No. 1-15, 5

Rupert Wingfield-Hayes, “Japan revisionists deny WW2 sex slave atrocities”, diakses <http://www.bbc.com/news/world-asia-33754932>, pada 23 April 2018

The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan, “Global Action Day Justice for Comfort Women“! Join the 1000th Wednesday Demonstration!?” Diakses dari https://www.koreaverband.de/wp-content/uploads/2011/07/ComfortWomen_1000Dem_PR-from-Korea_Dec2011.pdf pada 11 Januari 2018 pukul 21.54

Tony Firman, “Jugun Ianfu, Budak Wanita di Masa Penjajahan Jepang”, diakses dari <https://tirto.id/jugun-ianfu-budak-wanita-di-masa-penjajahan-jepang-cgZz>, pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 19.53.

Wikanto Arungbudoyo, Jepang Protes Upaya Pendaftaran Dokumen Budak Seks ke PBB, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/07/12/18/1734148/jepang-protes-upaya-pendaftaran-dokumen-budak-seks-ke-pbb>, pada 23 April 2018

Wikanto Arungbudoyo, Protes Patung Jugun Ianfu, Diplomat Jepang Tinggalkan Korsel, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/01/09/18/1586486/protes-patung-jugun-ianfu-diplomat-jepang-tinggalkan-korsel>, pada 23 April 2018

Yuki Tatsumi, Japan, South Korea Reach Agreement on 'Comfort Women', diakses dari <https://thediplomat.com/2015/12/japan-south-korea-reach-agreement-on-comfort-women/> pada 1 Februari 2018 pukul 11.11 WIB